



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 12 /SEK/KU.00/1/2018 9 Januari 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir
Tahun Anggaran 2017 pada Laporan Keuangan
Mahkamah Agung RI Semester II Tahun 2017

- Yth.
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
 2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
 3. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
 7. Sekretaris Badan Pelatihan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
 8. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia
 9. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 bahwa seluruh satuan kerja wajib menyusun Laporan Keuangan Semester/Tahunan dari Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA. Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun 2017, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana terlampir dalam surat ini dan berpedoman pada:

- a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- b) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11819/PB/2017 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2017
- c) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5660/PB.6/2016 tentang Kebijakan Akuntansi dalam rangka Penyusunan LKKL
- d) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10274/PB.6/2016 tentang Petunjuk Penggunaan Jurnal Piutang Tagihan TP/TGR dalam Aplikasi SAIBA.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia



A.S. PUDJOHARSOYO

Tembusan:

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
2. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Panitera Mahkamah Agung RI
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI
5. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

Lampiran I
 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
 Nomor : 12/SEK/KU.00/1/2018
 Hal : Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir
 Tahun Anggaran 2017 pada Laporan
 Keuangan Mahkamah Agung RI
 Semester II Tahun 2017

PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 PADA LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI SEMESTER II TAHUN 2017

1. Memastikan saldo akun-akun LRA, Neraca, LO dan LPE (bukan LO dan LPE Detail) per 1 Januari 2017 sama dengan saldo Laporan Keuangan Tahun 2016 *Audited*
2. Memastikan akun-akun akrual tahun 2016 telah dilakukan jurnal balik pada awal tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 antara lain: Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas/Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*), Piutang PNB/Piutang TP/TGR, Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Utang Kepada Pihak Ketiga), Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Jangka Pendek Lainnya
3. Bagi satuan kerja yang tidak menyajikan saldo akrual Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Utang kepada Pihak Ketiga) pada tahun 2016 atau terdapat selisih nilai realisasi belanja dengan saldo akrual Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Utang kepada Pihak Ketiga) tahun 2016 yang telah disajikan, agar melakukan Koreksi Beban LO sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 809/SEK/KU.00/08/2017 tentang Koreksi Beban di LO TA 2017 atas data transaksi akrual Belanja Yang Masih Harus Dibayar TA 2016
4. Satuan kerja wajib menyajikan akrual pada akun Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) atas sisa angsuran persekot gaji baru setelah bulan Juli Tahun 2017 atau sisa angsuran persekot gaji pegawai sebelum bulan Juli tahun 2017 sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 476A/SEK/KU.01/07/2017 tentang Ketentuan Persekot Gaji
5. Memastikan telah meng-*update* aplikasi Persediaan, SIMAKBMN, dan SAIBA versi terbaru/terakhir dan melakukan batal terima dan terima ulang ADK sebagai berikut:
 - a. Pada aplikasi Persediaan, lakukan batal terima dan pengiriman ulang ke aplikasi SIMAKBMN mulai bulan Januari sampai dengan Desember
 - b. Pada aplikasi SIMAKBMN, lakukan batal terima dari aplikasi Persediaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember namun hanya terima ulang untuk bulan Desember
 - c. Pada aplikasi SAIBA, lakukan Pengosongan Transaksi → Pengosongan GL Aset. kemudian lakukan Pack Data dan hanya terima ulang serta Posting untuk bulan Desember
6. Memastikan validitas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara Pengeluaran dan Aplikasi SILABI per 31 Desember 2017
7. Lakukan Rekonsiliasi Internal Data Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA terlebih dahulu dengan akurat dan valid sebelum mengunggah ke Aplikasi e-Rekon-LK Kementerian Keuangan RI dan memastikan data pada Aplikasi e-Rekon-LK:
 - a) Telah sama dengan saldo LRA, Neraca, LO dan LPE per tanggal 31 Desember 2017 pada Aplikasi SAIBA
 - b) Tidak diperbolehkan terdapat Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister pada Semester II/Tahunan pada Neraca per 31 Desember 2017. Apabila terdapat akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister pada akhir tahun dikarenakan ketidaksesuaian akun belanja, maka dapat dilakukan jurnal koreksi akuntansi secara manual pada Aplikasi SAIBA sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11819/PB/2017 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir

Dalam hal perlakuan akuntansi pada antivirus dan server yang terdapat ketidaksesuaian akun belanja dengan penginputan pada Aplikasi SIMAKBMN dan SAIBA yang menghasilkan akun Belum Diregister adalah sebagai berikut:

 1. Dalam hal masih terdapat Aset Lainnya yang Belum Diregister (pembelian antivirus dibawah masa manfaat 1 tahun) dan keterbatasan waktu untuk melakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka untuk mengeliminasi lakukan jurnal umum sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	xxxx	
166411	Aset Lainnya Belum Diregister		xxxx

2. Dalam hal masih terdapat Aset Tetap Belum Diregister (pembelian server) akibat terjadi kesalahan pembebanan akun belanja yang tidak dapat lagi dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja karena keterbatasan waktu, maka untuk mengeliminasi lakukan jurnal umum sebagai berikut:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
132211	Peralatan dan Mesin Yang Belum Diregister	xxxx	
134213	Jaringan Yang Belum Diregister		xxxx

- c) Tidak diperbolehkan saldo minus pada realisasi belanja dan saldo minus pada pengembalian belanja melebihi realisasi belanja. Apabila terdapat saldo minus mohon diperbaiki dan atau diberikan pengungkapan pada CaLK jika tidak bisa diperbaiki
- d) Tidak diperbolehkan Saldo Tidak Normal dan bila terdapat Saldo Tidak Normal, mohon diperbaiki dan atau diberikan pengungkapan pada CaLK jika tidak bisa diperbaiki
8. Satuan kerja wajib menyajikan saldo akrual terkait tagihan pembayaran yang belum terbayarkan dan setoran SSBP/SSPB yang belum disetorkan ke Negara karena melewati Tahun Anggaran 2017, agar membuat/menyusun Kartu, Rincian dan Daftar Perhitungan serta mendokumentasi seluruh dokumen sumber transaksi akrual dan dituangkan dalam Formulir Memo Penyesuaian yang wajib diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku penanggungjawab atas Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum yang dibuat serta diungkapkan pada CaLK. Transaksi akrual dimaksud diantaranya:
- Kas di Bendahara Pengeluaran (lampiran I)
 - Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (lampiran II)
 - Kas di Bendahara Penerimaan (lampiran III)
 - Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (lampiran IV)
 - Piutang PNPB dan Peny Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar (lampiran V)
 - Piutang TP/TGR dan Peny Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR (lampiran VI)
 - Pendapatan Diterima Dimuka (lampiran VII)
 - Belanja Dibayar Dimuka (lampiran VIII)
 - Belanja Yang Masih Harus Dibayar (lampiran IX)

Contoh Jurnal Penyesuaian dengan Formulir Memo Penyesuaian adalah sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Kementerian Negara/Lembaga		:	Mahkamah Agung RI		
Eselon I		:	Badan Urusan Administrasi		
Wilayah		:	Instansi Pusat		
Satuan Kerja		:	Badan Urusan Administrasi		
No. Dokumen		:	Kartu Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)		
Tanggal		:	31 Desember 2017		
Tahun Anggaran		:	Tahun 2017		
Keterangan		:	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -Tuntutan Perbendaharaan/Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2017		
Kategori Jurnal Penyesuaian		:			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">V</div>		:	Penyisihan Piutang		
No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1.	D	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	12.625.909	
	K	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		12.625.909
Dibuat	:	Kasubbag Keuangan	Disetujui	:	Kuasa Pengguna Anggaran
				Diinput	:
					Operator SAIBA
		XXXX, SE			XXXX, SH
					XXXX, SE
Tanggal	:	31 Desember 2017	Tanggal	:	31 Desember 2017
				Tangga	:
					31 Desember 2017

9. Menyusun kartu piutang serta melakukan penyisihan atas piutang tak tertagih per 31 Desember 2017 dengan perhitungan sebagai berikut:
- Kondisi Lancar : $5/1000 \times \text{Jumlah Piutang TP/TGR}$
 - Kondisi Macet : $100\% \times \text{Jumlah Piutang TP/TGR}$
 - Ilustrasi Jurnal atas penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2017 dibawah ini melalui Jurnal Penyesuaian kategori 05:

Pada Aplikasi SAIBA (Penyisihan Piutang Jangka Panjang)

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	12.625.909	
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi		12.625.909

10. Setelah membuat Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, kemudian lakukan Reklasifikasi Bagian Lancar TP/TGR dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian lancar TP/TGR pada akhir tahun 2017 sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10274/PB/2016 tentang Petunjuk Penggunaan Jurnal Piutang Tagihan TP/TGR dalam Aplikasi SAIBA
11. Melakukan Inventarisasi Fisik (Opname Fisik) atas persediaan per 31 Desember 2017 dan menginput hasil opname fisik pada Aplikasi Persediaan pada Menu → Transaksi → Hasil Opname Fisik
12. Satuan kerja wajib melakukan penyusutan reguler semester I dan II tahun 2017 pada Aplikasi SIMAKBMN Menu → Utility → Penyusutan Reguler Semesteran
13. Satuan kerja wajib melakukan amortisasi pada Aplikasi SIMAKBMN Menu → Utility → Amortisasi
14. Satuan kerja wajib membuat Tabel Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap/Aset Lainnya (lampiran I), Tabel Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) (lampiran II) dan Tabel Daftar Hibah Langsung (lampiran III) pada Laporan Keuangan Pokok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
15. Untuk menjaga keandalan dan kualitas Laporan Keuangan Semester II/Tahunan, diwajibkan:
- Tingkat Satker (UAKPA), Tingkat Koordinator Wilayah (UAPPA-W), Unit Eselon I (UAPPA-E1) dan Lembaga (UAPA) untuk melakukan verifikasi dan validasi dengan menggunakan Kertas Kerja Telaah yang ditandatangani dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dan Kasubbag Keuangan
 - Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA membandingkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2016 *Audited* secara manual dengan Laporan serupa per tanggal 31 Desember 2017 pada sisi perbandingan tahun lalu yang dihasilkan dari aplikasi e-Rekon-KL sesuai tingkatan laporan masing-masing.
16. *Back-up* Persediaan, SIMAKBMN dan SAIBA per 31 Desember 2017 setelah dikeluarkan BAR e-Rekon-LK oleh KPPN agar di *Upload* ke Aplikasi Komdanas. Bila terdapat perubahan/perbaikan data agar mengirimkan kembali *Back-up* terbaru.
17. Waktu/Periode dilakukan penyesuaian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016.

WAKTU/PERIODE DILAKUKAN PENYESUAIAN

No	Pos/Akun-Akun	Periode Penyesuaian	Jurnal Balik Di Awal Tahun
1	Pendapatan Diterima Di Muka	Tahunan	Perlu
2	Beban Dibayar di Muka	Tahunan	Perlu
3	Beban yang Masih Harus Dibayar	Tahunan	Perlu
4	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Semesteran	Tidak
5	Penyusutan dan Amortisasi	Semesteran	Tidak
6	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Tahunan	Jurnal balik dilakukan saat penyetoran/pembayaran
7	Kas Di Bendahara Penerimaan	Tahunan	Jurnal balik dilakukan saat penyetoran/pembayaran
8	Reklasifikasi Piutang	Tahunan	Perlu
9	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	Tahunan	Jurnal balik dilakukan saat penyetoran/pembayaran
10	Persediaan	Semesteran	Tidak
11	Kelebihan Pembayaran Pajak/PNBP	Tahunan	Tidak
12	Uang Muka Belanja	Tahunan	Tidak

Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran

Lampiran I

BA : 005 Mahkamah Agung
 Eselon I :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Tunai	Saldo Per 31 Desember 2017			KET
						Saldo	Saldo Bank	Bank dan No Rek	
						Total			
								
								
								
								

....., Januari 2018
 Sekretaris.....

.....
 NIP

Rincian Nilai Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran

Lampiran II

BA : 005 Mahkamah Agung
 Eselon I :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2017				KET
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		

....., Januari 2018
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerima

Lampiran III

BA : 005 Mahkamah Agung
 Eselon I :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Tunai	Saldo Per 31 Desember 2017			KET
						Saldo	Saldo Bank	Bank dan No Rek	

....., Januari 2018
 Sekretaris.....

.....
 NIP

Rincian Nilai Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan

Lampiran IV

BA : 005 Mahkamah Agung
 Eselon I :
 Wilayah :
 Satuan Kerja :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Tunai	Saldo Per 31 Desember 2017			KET	
						Saldo	Saldo Bank	Bank dan No Rek		Total
									
									
									
									

....., Januari 2018
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG BUKAN PAJAK DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
per 31 Desember 2017

Lampiran V

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (1500) Kalimantan Selatan
 Satuan Kerja : (402449) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

No	Nama Debitur	Uraian	Piutang PNBK	Nilai agunan/ sitaan yang diperhitungkan	Saldo Piutang setelah agunan/ sitaan	Penyisihan Piutang				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
						5/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1	Bapak A	Sewa Kantin	300.000	-	300.000	1.500	0	0	0	1.500	
2	Bapak B	Sewa Kantin	2.000.000	-	2.000.000	0	200.000	0	0	200.000	
3				-							
4				-							

....., Januari 2018
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

DAFTAR PERHITUNGAN BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR
per 31 Desember 2017

Lampiran VI

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1500) Kalimantan Selatan
Satuan Kerja : (402449) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

No	Nama Debitur	Uraian	Piutang TP/TGR	Angsuran s.d 31 Desember 2017	Sisa TP/TGR	Bagian Lancar - Tagihan TGR	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
							5/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1	Bapak A	Kehilangan mobil	81.000.000	57.375.000	23.625.000	13.500.000	67.500	0	0	0	67.500	Lancar
2	Bapak B	Kehilangan motor	9.200.000	7.666.680	1.533.320	1.533.320	7.667	0	0	0	7.667	Lancar
3	Bapak B	Kehilangan mobil	200.000.000	-	200.000.000	-	0	0	0	0	0	Macet

....., Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP.....

DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG TAGIHAN TP/TGR DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TAGIHAN TP/TGR
per 31 Desember 2017

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (1500) Kalimantan Selatan
Satuan Kerja : (402449) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

No	Nama Debitur	Uraian	Piutang TP/TGR	Angsuran s.d 31 Desember 2017	Sisa TP/TGR	Bagian Lancar - Tagihan TGR	Tagihan TGR	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
								5/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1	Bapak A	Kehilangan mobil	81.000.000	57.375.000	23.625.000	13.500.000	10.125.000	50.625	0	0	0	50.625	Lancar
2	Bapak B	Kehilangan mobil	200.000.000	-	200.000.000	-	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	Macet
3													

....., Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP.....

KARTU RINCIAN NILAI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
per 31 Desember 2017

Lampiran VII

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (1500) Kalimantan Selatan
 Satuan Kerja : (402449) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

No.	Uraian	Nilai SSBP	Jangka Waktu (Bulan)	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa		Pendapatan Diterima Di Muka
						s.d 31 Desember 2016	Tahun Berjalan 2017	
1	Sewa ATM BRI	24.000.000	24	01 November 2016	01 November 2018	2.000.000	12.000.000	10.000.000
2	Sewa Lahan	18.000.000	18	01 Desember 2016	25 November 2018	1.000.000	12.000.000	5.000.000
3	Sewa Ruang/Gedung BNI/ATM Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	120.000.000	60	01 November 2016	3 January 2021	4.000.000	24.000.000	92.000.000

....., Januari 2018
 Sekretaris.....

.....
 NIP

**KARTU RINCIAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DI MUKA (PERSEKOT GAJI)
per 31 Desember 2017**

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (1500) Kalimantan Selatan
 Satuan Kerja : (402449) Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

No	Nama Pegawai	Nilai SP2D	Lama Angsuran (bulan)	Angsuran per Bulan	TMT	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran (bulan)	Total Angsuran (rupiah)	Sisa Angsuran (bulan)	Sisa Angsuran (rupiah)	Rincian Angsuran per Akun (rupiah)				Jumlah Saldo Akhir
											511111	511119	511121	511122	
1	Bapak A	6.294.800	5	1.258.960	04 September 2017	04 Januari 2018	4	5.035.840	1	1.258.960	33	110.432	44.173		1.258.960
2	Bapak B	6.039.300	5	1.207.860	21 November 2017	21 Maret 2018	2	2.415.720	3	3.623.580	95	317.850	127.140		3.623.580
3	Bapak C	5.069.600	5	1.013.920	12 Oktober 2017	12 Februari 2018	3	3.041.760	2	2.027.840	53	177.876	71.150		2.027.840
4	Bapak D	10.139.200	3	3.379.733	21 November 2017	21 Januari 2018	2	6.759.467	1	3.379.733	88	296.460	118.584		3.379.733

....., Januari 2018
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

**KARTU RINCIAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DI MUKA (SEWA RUMAH DINAS)
per 31 Desember 2017**

K/L : (005) Mahkamah Agung
 BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (1500) Kalimantan Selatan
 Satuan Kerja : (099197) Pengadilan Negeri Banjarmasin

No	Nama Pegawai	Nilai SP2D	Lama Angsuran (bulan)	Angsuran per Bulan	TMT	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran (bulan)	Total Angsuran (rupiah)	Sisa Angsuran (bulan)	Sisa Angsuran (rupiah)	Rincian Angsuran per Akun		Jumlah Saldo Akhir
											522141		
1	Rmh Dns Wakil Ketua	30.000.000	24	1.250.000	02 Januari 2017	02 Januari 2019	12	15.000.000	12	15.000.000		15.000.000	15.000.000
2	Rmh Dns Tipikor	12.000.000	12	1.000.000	21 November 2017	21 November 2018	2	2.000.000	10	10.000.000		10.000.000	10.000.000
3													
4													

....., Januari 2018
 Sekretaris.....

.....
 NIP.....

KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
per 31 Desember 2017

Lampiran IX

No.	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA.	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	1500	Kalimantan Selatan	402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	2017	511111 511121 511122 511125	Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. PPh PNS	939.600 93.960 26.226 30.210	SPM NO: 00005 TANGGAL 19-01-2018 SK DIRJEN BADILAG NO: 1716/DJU/SK/KP04.1/10/2017 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS	Kekurangan Gaji 3 Bulan atas kenaikan pangkat nama Fitrianoor, SH., MH
2	1500	Kalimantan Selatan	402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	2017	511129	Belanja Uang Makan PNS	21.844.000	SPM NO: 00005 TANGGAL 19-01-2018	Susulan uang makan bulan Desember 2017
3	1500	Kalimantan Selatan	402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	2017	522111	Belanja Langganan Listrik	11.826.900	REKENING TAGIHAN LISTRIK TANGGAL 7 JANUARI 2018	Beban Langganan Listrik Bulan Desember 2017
4	1500	Kalimantan Selatan	402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	2017	522112	Belanja Langganan Telepon	564.960	REKENING TAGIHAN TELEPON TANGGAL 8 JANUARI 2018	Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2017
5	1500	Kalimantan Selatan	402449	PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	2017	522113	Belanja Langganan Air	71.000	REKENING TAGIHAN AIR TANGGAL 8 JANUARI 2018	Beban Langganan Air Bulan Desember 2017
6									
JUMLAH TOTAL								35.396.856		

....., Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP.....



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA
TELEPON (021) 3449230 EXT. 5203, 5204 FAKSIMILE (021) 3846402
WEBSITE: www.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-11819 /PB/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
Tahun 2017 *Unaudited* serta Perlakuan Akuntansi atas
Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2017

29 Desember 2017

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil
Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
(lampiran I)
Jakarta

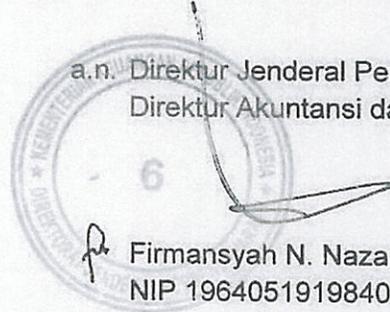
Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 (*Unaudited*), berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 Ayat (2) dinyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) masing-masing. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Dalam rangka percepatan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, penyampaian LKKL Tahun 2017 disampaikan paling lambat tanggal 21 Februari 2018 untuk 31 K/L pada lampiran II.a dan tanggal 28 Februari 2018 pukul 12.00 WIB untuk 56 K/L pada lampiran II.b.
3. Dalam penyusunan laporan keuangan, setiap K/L diminta untuk menyajikan LKKL Tahun 2017 *Unaudited* sesuai dengan format pada BAB III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
4. Perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pada akhir tahun anggaran 2017 agar memedomani lampiran III surat ini.
5. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan LKKL Tahun 2017 agar memedomani lampiran IV surat ini.

6. Sehubungan dengan dilakukannya penilaian ulang aset tetap pada K/L sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Ulang Aset Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, K/L diminta untuk menyajikan dan mengungkapkan transaksi tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan memedomani lampiran V surat ini.
7. Dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL Tahun 2017 diminta Kementerian Negara/Lembaga untuk:
 - a. Melakukan telaah atas laporan keuangan mulai dari level Satker, Wilayah, Eselon I hingga KL. Contoh format telaah laporan keuangan terdapat pada lampiran VI surat ini;
 - b. Memastikan bahwa saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan aplikasi Silabi;
 - c. Menyusun kartu piutang dan daftar piutang serta melakukan penyisihan atas piutang tak tertagih per 31 Desember 2017;
 - d. Memastikan bahwa saldo persediaan adalah nilai pada hasil inventarisasi fisik atas persediaan per 31 Desember 2017;
 - e. Mendokumentasikan seluruh dokumen sumber transaksi, termasuk Memo Penyesuaian;
 - f. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian LKKL.
8. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami harap Saudara menetapkan langkah-langkah seperlunya agar LKKL Tahun 2017 dapat disampaikan secara tepat waktu, akurat dan berkualitas.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



Firmansyah N. Nazaroedin
NIP 196405191984021001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Inspektur Jenderal/Inspektur/Satuan Pengawas Internal seluruh Kementerian Negara/Lembaga;
4. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara seluruh Indonesia;
6. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia;
7. Para Kepala KPKNL seluruh Indonesia.

**DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/KEPALAWAKIL
KEPALA/DIREKTUR UMUM
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA**

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
1.	Sekretaris Jenderal MPR RI
2.	Sekretaris Jenderal DPR RI
3.	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4.	Sekretaris Jenderal BPK RI
5.	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6.	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
7.	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
8.	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
9.	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
10.	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
11.	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
12.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
13.	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
14.	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
15.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
16.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
17.	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
18.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
19.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
20.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
21.	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
22.	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
23.	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
24.	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
25.	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
26.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
27.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
28.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
29.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
30.	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31.	Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata RI
32.	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
33.	Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
34.	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI
35.	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
36.	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
37.	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
38.	Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
39.	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
40.	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
41.	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
42.	Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
43.	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
44.	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
45.	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
46.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
47.	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
48.	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
49.	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
50.	Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
51.	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
52.	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
53.	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
54.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
55.	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
56.	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
57.	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
58.	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
59.	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
60.	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
61.	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
62.	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
63.	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
64.	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
65.	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
66.	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
67.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
68.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
69.	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
70.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara/Lembaga
71.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72.	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73.	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74.	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75.	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76.	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77.	Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78.	Anggota I Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79.	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80.	Deputi Administrasi Sekretaris Kabinet
81.	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu
82.	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83.	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85.	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86.	Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif
87.	Sekretaris Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Menyampaikan LKKL
pada Tanggal 21 Februari 2018

No.	Kode Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
3	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
4	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
5	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
6	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
7	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
8	050	BADAN INTELIJEN NEGARA
9	051	LEMBAGA SANDI NEGARA
10	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL
11	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
12	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
13	077	MAHKAMAH KONSTITUSI
14	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
15	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
16	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL
17	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
18	100	KOMISI YUDISIAL
19	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
20	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)
21	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
22	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
23	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU
24	110	OMBUDSMAN
25	112	BP KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
26	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
27	114	SEKRETARIAT KABINET
28	118	BP KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
29	119	BADAN KEAMANAN LAUT
30	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
31	121	BADAN EKONOMI KREATIF

Daftar Kementerian Negara/Lembaga yang Menyampaikan LKKL
pada Tanggal 28 Februari 2018

No.	Kode Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga
1	004	BPK RI
2	005	Mahkamah Agung RI
3	006	Kejaksaan Agung RI
4	007	Kementerian Sekretariat Negara RI
5	011	Kementerian Dalam Negeri RI
6	012	Kementerian Luar Negeri RI
7	024	Kementerian Pertahanan RI
8	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
9	015	Kementerian Keuangan RI
10	018	Kementerian Pertanian RI
11	019	Kementerian Perindustrian RI
12	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
13	022	Kementerian Perhubungan RI
14	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
15	024	Kementerian Kesehatan RI
16	025	Kementerian Agama RI
17	026	Kementerian Ketenagakerjaan RI
18	027	Kementerian Sosial RI
19	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
20	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
21	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
22	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
23	040	Kementerian Pariwisata RI
24	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
25	044	Kementerian Koperasi dan Unit Kecil dan Menengah RI
26	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
27	054	Badan Pusat Statistik
28	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
29	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
30	057	Perpustakaan Nasional
31	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
32	060	Kepolisian Negara RI
33	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan
34	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal
35	066	Badan Narkotika Nasional
36	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

37	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
38	075	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
39	076	Komisi Pemilihan Umum
40	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
41	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional
42	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
43	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
44	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
45	086	Lembaga Administrasi Negara
46	087	Arsip Nasional RI
47	088	Badan Kepegawaian Negara
48	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
49	090	Kementerian Perdagangan RI
50	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
51	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
52	107	Badan SAR Nasional
53	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
54	115	Badan Pengawas Pemilu
55	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
56	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2017

Sehubungan dengan ditetapkannya Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2017, dipandang perlu untuk menyusun petunjuk teknis perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2017 untuk satker non-BLU pengguna Aplikasi SAIBA. Sedangkan pengaturan untuk satker BLU dan satker *piloting* Aplikasi SAKTI diatur dalam surat tersendiri. Hal-hal yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan kontrak wanprestasi atau pencairan klaim jaminan kontrak di akhir tahun anggaran 2017, yang meliputi jaminan penyelesaian pekerjaan dan jaminan pemeliharaan.
2. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.
3. Penyajian selisih kurs Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang asing.
4. Koreksi akun aset belum diregister dikarenakan ketidaktepatan penggunaan akun belanja.
5. Hibah langsung bentuk uang yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 belum dilakukan pengesahan.
6. Hibah langsung bentuk barang/jasa yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 belum dilakukan pengesahan.
7. Rekapitulasi saldo akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan.
8. Pertanggungjawaban UP/TUP tahun 2017 yang diajukan pada tahun 2018.

Adapun pengaturan lebih detail terkait hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Kontrak Wanprestasi atau Pencairan Klaim Jaminan Kontrak di Akhir Tahun Anggaran 2017

a. Jaminan Penyelesaian Pekerjaan pada Akhir Tahun Anggaran

Pasal 14 dan 15 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2017 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/BAPP-nya dibuat tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 wajib dilampiri antara lain asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut.
- 2) Untuk pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jaminan/garansi bank dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai penjaminan dari PPK.

- 3) Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2017, namun telah dibayar 100% sampai berakhirnya masa kontrak, maka:
- PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi dengan BAPP dan Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak masa kontrak berakhir.
 - Pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan tersebut, Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.
 - Apabila BAPP sebagaimana pada poin angka 1 tidak disampaikan ke KPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa kontrak berakhir, pada hari kerja berikutnya Kepala KPPN membuat surat pernyataan tidak menerima BAPP dan mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung Kas Negara sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan.
 - Klaim pencairan jaminan/garansi bank tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM.
 - Apabila bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK wajib mengembalikan uang jaminan/garansi tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara.

Perlakuan akuntansi terkait kejadian tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat diatur sebagai berikut:

- Satker tidak menyajikan jaminan/garansi bank di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- Apabila pencairan jaminan/garansi bank dan penyetoran ke Kas Negara dilakukan sampai dengan 31 Desember 2017, maka:
 - Penyetoran pengembalian belanja ke Kas Negara tersebut dilakukan dengan mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun belanja yang bersangkutan (5xxxxx). Apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan oleh KPPN, bukti setor dimaksud disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan satker.
 - Pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran pengembalian belanja ke Kas Negara tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan sebagai berikut:

(1) Buku Besar Kas

Pada saat satker merekam Bukti Penerimaan Negara (BPN), Aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dengan jurnal sebagai berikut:

D	115612	Piutang dari KPPN	xxxx
K	5xxxxx	Belanja xxx	xxxx

(2) Buku Besar Akrual

- (a) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang menghasilkan barang persediaan (persediaan yang perolehannya menggunakan termin/persediaan dalam proses), pada saat satker merekam BPN, Aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai pengurang persediaan yang belum diregister, dengan jurnal sebagai berikut:

D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx
K	117911	Persediaan Yang Belum Diregister	xxxx

Jurnal tersebut secara otomatis akan mengeliminasi akun Persediaan Yang Belum Diregister yang terbentuk pada saat realisasi belanja (pencatatan SP2D pada Aplikasi SAIBA). Atas kondisi ini, seharusnya satker belum melakukan pencatatan persentase persediaan yang belum diterima/belum diselesaikan pekerjaannya pada Aplikasi Persediaan, karena pencatatan pada Aplikasi Persediaan baru dilakukan ketika satker menerima barang disertai BAST. Dengan demikian, satker tidak perlu melakukan koreksi pada Aplikasi Persediaan.

- (b) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja modal, pada Buku Besar Akrual dicatat sebagai pengurang Aset Tetap/Aset Lainnya. Pencatatan atas BPN pada Aplikasi SAIBA secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx

Dalam hal belanja modal dimaksud menghasilkan Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan, maka nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi pengembalian belanja. Oleh karena itu, apabila satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan pada Aplikasi SIMAK-BMN, satker harus melakukan pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/belanja yang dikembalikan ke Kas Negara melalui menu Koreksi.

Atas transaksi koreksi tersebut, Aplikasi SIMAK-BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx
K	13xxxx/ 16xxxx	Konstruksi dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	xxxx

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, dilakukan jurnal koreksi secara manual untuk mengeliminasi Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D	13xxxx /16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx

- (c) Dalam hal pengembalian berupa akun belanja barang yang tidak menghasilkan barang persediaan, pada saat satker merekam BPN, Aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai pengurang beban tahun berjalan dengan jurnal sebagai berikut:

D	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	xxxx
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx

- 3) Apabila pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran ke Kas Negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2017, maka:

- a) Pada Neraca per 31 Desember 2017 disajikan sebagai Piutang PNBPN sekaligus mengoreksi pencatatan Beban/Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan, dengan jurnal manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

- (1) Jika terkait akun belanja barang yang menghasilkan persediaan:

D	115211	Piutang PNBPN	xxxx
K	117911	Persediaan Yang Belum Diregister	xxxx

- (2) Jika terkait akun belanja modal:

D	115211	Piutang PNBPN	xxxx
K	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx

- (3) Jika terkait akun belanja barang yang tidak menghasilkan persediaan:

D	115211	Piutang PNBPN	xxxx
K	52xxxx	Beban xxx	xxxx

Atas Piutang PNBPN tersebut, dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih dengan kualitas lancar dengan memperhitungkan nilai jaminan/garansi bank, sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Tata cara pencatatan dan penyajian penyisihan piutang tak tertagih dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.

- b) Dalam hal pencairan jaminan/garansi bank/penyetoran ke kas negara terkait perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan, nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai realisasi pembayaran kontrak dikurangi nilai belanja yang dikembalikan. Oleh karena itu, apabila satker telah mencatat seluruh realisasi Belanja Modal sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tidak Berwujud dalam,

Pengerjaan di dalam Aplikasi SIMAK-BMN, satker harus melakukan pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/belanja yang dikembalikan ke Kas Negara pada menu Koreksi.

Atas transaksi koreksi tersebut, Aplikasi SIMAK-BMN akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

D	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx
K	13xxxx/ 16xxxx	Konstruksi Dalam Pengerjaan/Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	xxxx

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, pada Aplikasi SAIBA dilakukan jurnal koreksi secara manual untuk mengeliminasi Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister sebagai berikut:

D	13xxxx/ 16xxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxxx
K	391116/ 391118	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi/Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	xxxx

(1) Penyetoran ke Kas Negara mencantumkan kode BA, Eselon I, dan Satker yang bersangkutan, serta menggunakan kode akun Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (42395x). Apabila penyetoran dilakukan oleh KPPN, bukti setor dimaksud disampaikan kepada satker yang bersangkutan dan merupakan dokumen sumber untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban atau pelaporan satker.

(2) Penyetoran pengembalian belanja tersebut dicatat oleh satker yang bersangkutan pada tahun 2018 sebagai berikut:

(a) Buku Besar Kas

Pada saat satker merekam BPN, Aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D	219711	Utang kepada KUN	xxxx
K	42395x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx

(b) Buku Besar Akrua

Pada saat satker merekam BPN, Aplikasi SAIBA secara otomatis akan mencatat sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu dengan jurnal sebagai berikut:

D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx
K	42395x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx

Selanjutnya pada Aplikasi SAIBA dibuat jurnal koreksi secara manual sebagai berikut:

D	42395x	Penerimaan Kembali Belanja xxx Tahun Anggaran yang Lalu	xxxx
K	115211	Piutang PNB	xxxx

b. Jaminan Pemeliharaan

Sesuai dengan dengan Pasal 13 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2017, disebutkan bahwa penerbitan SP2D untuk pembayaran biaya pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak (retensi), diatur sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%.
- b. Untuk masa pemeliharaan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 atau yang melampaui tahun anggaran 2017, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2017 dengan dilampiri *fotocopy* jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.
- c. SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.
- d. Jaminan pemeliharaan diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/*surety bond*. Nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan, dan masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan.

Perlakuan akuntansi terkait dengan kejadian tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Jaminan pemeliharaan/garansi bank tidak perlu disajikan di dalam Neraca, namun cukup diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- b. Apabila dalam masa pemeliharaan pihak ketiga wanprestasi, maka jaminan pemeliharaan dicairkan dan disetor ke Kas Negara oleh satker menggunakan BPN sebagai pendapatan Anggaran lain-lain (kode akun 423999).
- c. Setoran pencairan jaminan pemeliharaan tersebut tidak mengurangi nilai aset tetap/aset lainnya yang bersangkutan.
- d. Pencairan jaminan pemeliharaan dan penyetoran yang dilakukan pada Tahun 2017 ataupun setelah tanggal 31 Desember 2017 diinput dalam Aplikasi SAIBA berdasarkan BPN dan secara otomatis akan menghasilkan jurnal sebagai berikut:

Buku Besar Kas:

D	219711	Utang kepada KUN	xxxx
K	423999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx

Buku Besar Akrual:

D	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxxx
K	423999	Pendapatan Anggaran lain-lain	xxxx

2. Penyajian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Sesuai dengan PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dapat berupa pajak yang belum disetor dan uang pihak ketiga lainnya yang belum diserahkan, seperti honorarium pegawai dan uang perjalanan dinas. Selain itu, pada Bendahara Pengeluaran dimungkinkan terdapat Kas Lainnya yang merupakan pendapatan PNBP umum, misalnya pendapatan jasa giro.

Untuk itu, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori. Pencatatan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dilakukan secara manual pada Aplikasi SAIBA melalui Jurnal Penyesuaian kategori 9 (Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran) antara lain:

a. Pendapatan PNBP

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx
K	42xxxx	Pendapatan PNBP xxx	xxxx

Digunakan untuk mencatat pendapatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum disetor ke Kas Negara, misalnya pendapatan jasa giro.

b. Kas lainnya berupa potongan pajak oleh bendahara pengeluaran tetapi belum disetor ke kas negara

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx
K	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Yang Belum Disetor	xxxx

Digunakan untuk mencatat Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara, misalnya potongan pajak atas belanja yang dilakukan melalui mekanisme UP/TUP.

c. Kas lainnya berupa uang Pihak Ketiga lainnya yang belum diserahkan

D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	xxxx
K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxxx

Digunakan untuk mencatat Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan hak pihak ketiga/pegawai yang masih belum dibayar, misalnya, honorarium pegawai dan uang perjalanan dinas yang dicairkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran.

3. Penyajian Selisih Kurs Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing

Pada beberapa K/L yang memiliki satker perwakilan di luar negeri, dimungkinkan mengelola UP/TUP dalam bentuk valuta asing sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Penyajian sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk valuta asing yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan akhir tahun 2017 dilakukan dengan mengacu pada Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3466/PB.6/2017 tanggal 6 April 2017 hal Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran Dalam Mata Uang Asing. Saldo kas dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral Indonesia pada tanggal pelaporan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Satker perlu memastikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran telah sama dengan nilai nominal dalam mata uang asing (saldo valas) dengan KPPN mitra kerja.
- b. Satker melakukan jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA terhadap akun Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN, dengan mengakui pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi.
- c. Mengingat bahwa penyesuaian atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ini harus dilakukan baik oleh satker maupun KPPN mitra, satker agar berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja masing-masing terkait kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan yang digunakan dalam melakukan jurnal penyesuaian.

Adapun jurnal yang dibentuk adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs tengah BI lebih besar dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai pendapatan, dilakukan pada menu jurnal penyesuaian kategori 12:

D	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx
K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN dilakukan pada menu jurnal umum:

D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxxx
K	219511	Uang Muka dari KPPN	xxxx

- 2) Dalam hal saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs tengah BI lebih kecil dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan.

Pengakuan Saldo selisih kurs belum terealisasi sebagai beban, dilakukan pada menu jurnal penyesuaian kategori 12:

D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	xxxx
K	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxxx

Penyesuaian akun Uang Muka dari KPPN dilakukan pada menu jurnal umum:

D	219511	Uang Muka dari KPPN	xxxx
K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi	xxxx

Selanjutnya, satker melakukan penyetoran sisa Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut pada tahun 2018 menggunakan valuta asing atau Rupiah. Penyetoran sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valuta asing dicatat sebesar ekuivalen nilai dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Nilai tersebut dimungkinkan berbeda dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang Rupiah yang disajikan pada tanggal pelaporan, dikarenakan perbedaan kurs yang digunakan. Atas selisih tersebut, satker dan KPPN tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian ketika dilakukan penyetoran. Selanjutnya, penyesuaian terhadap akun Kas

di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN dengan mengakui pendapatan/beban selisih kurs belum terealisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dilakukan oleh satker dan KPPN secara periodik dalam rangka penyusunan laporan keuangan bulanan.

Contoh:

Satker ABC merupakan salah satu satker perwakilan RI di luar negeri yang mengelola Kas di Bendahara pengeluaran dalam valuta asing USD.

Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah adalah sebesar Rp600.000,00. Sedangkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valuta asing adalah senilai USD50. Saldo tersebut telah sesuai dengan nilai nominal dalam valuta asing pada kartu pengawasan UP/TUP di KPPN mitra kerjanya. Kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2017 adalah USD1 = Rp13.500,00. Sehingga, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satker ABC yang harus disajikan dalam laporan keuangan tahun 2017 *audited* adalah Rp675.000,00 (USD50 x Rp13.500,00).

Dalam rangka penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan (31 Desember 2017), Satker ABC dan KPPN melakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui pendapatan/beban selisih kurs. Adapun jurnal yang dilakukan oleh Satker ABC secara manual pada Aplikasi SAIBA adalah sebagai berikut:

- Karena saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs tengah BI pada tanggal pelaporan lebih besar dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan, Satker ABC mengakui pendapatan selisih kurs belum terealisasi, untuk menyesuaikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

D	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	75.000
K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	75.000

- Selain itu, Satker ABC mengakui beban selisih kurs belum terealisasi, untuk menyesuaikan saldo Uang Muka dari KPPN

D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	75.000
K	219511	Uang Muka dari KPPN	75.000

Pada tanggal 25 Januari 2018, Satker ABC melakukan penyetoran sisa Kas di Bendahara Pengeluaran dalam valuta asing senilai USD50. Penyetoran tersebut dicatat menggunakan kurs tengah BI pada tanggal transaksi, di mana USD1 = Rp13.450,00. Dengan demikian, setoran dimaksud akan tercatat dalam Rupiah sebesar Rp672.500,00. Adapun jurnal yang terbentuk secara otomatis pada Aplikasi SAIBA ketika dilakukan perekaman BPN adalah sebagai berikut:

D	219511	Uang Muka dari KPPN	672.500
K	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	672.500

Penyetoran tersebut mengakibatkan:

- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satker ABC dalam valuta asing menunjukkan saldo nihil, baik secara fisik kas maupun secara pembukuan.

- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satker ABC dalam Rupiah menunjukkan saldo Rp2.500,00. Hal ini terjadi karena adanya selisih kurs, di mana kurs tengah BI pada tanggal transaksi penyetoran (25 Januari 2018) lebih kecil dari kurs tengah BI pada tanggal pelaporan (31 Desember 2017)

Atas selisih ini, satker dan KPPN mitra tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian.

Selanjutnya, pada tanggal pelaporan bulanan (31 Januari 2018), Satker ABC dan KPPN kembali menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Dengan asumsi kurs tengah BI pada tanggal 31 Januari 2018 adalah USD1 = Rp13.475,00, maka saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang seharusnya disajikan dalam neraca per 31 Januari 2018 adalah Rp0 (USD0 x Rp13.475.000,00). Penyesuaian selisih kurs yang dicatat Satker ABC adalah sebagai berikut:

- Karena saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah berdasarkan hasil penjabaran kurs tengah BI pada tanggal pelaporan lebih kecil dari saldo Buku Besar Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Rupiah pada tanggal pelaporan, Satker ABC mengakui beban selisih kurs belum terealisasi, untuk menyesuaikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

D	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.500
K	11161x	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.500

- Selain itu, Satker ABC mengakui pendapatan selisih kurs belum terealisasi, untuk menyesuaikan saldo Uang Muka dari KPPN

D	219511	Uang Muka dari KPPN	2.500
K	491111	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.500

4. Koreksi Akun Aset Belum Diregister Dikarenakan Ketidaktepatan Penggunaan Akun Belanja

Kesalahan akun belanja dapat menyebabkan timbulnya akun aset belum diregister pada neraca yang tidak bisa tereliminasi secara otomatis. Contoh:

- Akun belanja barang persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan barang persediaan, tetapi seharusnya untuk beban yang lain.
- Akun belanja modal yang digunakan bukan untuk perolehan atau pengembangan aset tetap/aset lainnya, tetapi seharusnya menimbulkan beban atau menghasilkan BMN ekstrakomptabel.
- Akun belanja yang seharusnya tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya, tetapi digunakan untuk mencatat perolehan/pengembangan persediaan/aset tetap/aset lainnya.
- Kesalahan pemilihan akun belanja modal, misalnya belanja modal gedung dan bangunan menghasilkan peralatan dan mesin atau aset tak berwujud.
- Kesalahan penggunaan akun belanja modal yang digunakan untuk perolehan barang persediaan.
- Akun belanja persediaan yang digunakan untuk perolehan aset tetap/aset lainnya.

Terhadap ketidaksesuaian ini, seharusnya dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja sehingga terdapat kesesuaian antara jenis belanja dengan substansi *output* yang dihasilkan. Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan tahun 2017, dikarenakan pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, agar tidak terjadi salah saji di dalam laporan keuangan perlu dilakukan koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum diregister dari neraca.

Tata cara koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum diregister dilakukan melalui penjurnalan secara manual pada Aplikasi SAIBA, dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Setiap jurnal manual agar dibuat berdasarkan Memo Penyesuaian yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang, serta dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait.

Selain itu, satker wajib mengungkapkan secara memadai alasan/pertimbangan manajemen tidak melakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja di dalam CaLK.

5. Hibah Langsung Bentuk Uang yang sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 Belum Dilakukan Pengesahan

Bentuk hibah langsung yang diterima Kementerian/Lembaga dapat berupa uang, barang, atau jasa. Pada saat kas diterima dari donor, satuan kerja mencatat kas dari hibah langsung tersebut sebagai Kas dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan. Setelah mendapatkan register dari DJPPR, satuan kerja mengajukan revisi DIPA. Selanjutnya, satuan kerja mengajukan pengesahan pendapatan hibah dan belanja yang bersumber dari hibah dengan menyampaikan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) kepada KPPN. KPPN akan menerbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL).

Apabila sampai dengan akhir tahun terdapat penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung dan belum dilakukan pengesahan, dibutuhkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban, aset, kewajiban, dan ekuitas yang timbul. Jurnal penyesuaian dilakukan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan berpedoman pada PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

a. Penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung yang dilakukan pada Tahun 2017

- 1) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung dilakukan pada tahun 2017 dan tidak menghasilkan aset, satker membuat jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	5xxxxx	Beban xxx	xxx	
K	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan		xxx

- 2) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung dilakukan pada tahun 2017 menghasilkan aset, satker membuat jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya Yang Belum Diregister	xxx	
K	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan		xxx

Selanjutnya Satker merekam aset tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN, serta menyajikan di Neraca sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN apabila BAST atas perolehan aset tersebut tertanggal tahun 2017 dilakukan melalui menu Perolehan Lainnya. Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN:

D	11xxxx/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	
K	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		xxx

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, satker agar membuat jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	xxx	
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister		xxx

b. Penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung yang dilakukan pada Tahun 2016 dan sebelumnya.

- 1) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung yang dilakukan pada Tahun 2016 atau sebelumnya tidak menghasilkan aset, maka berdasarkan bukti-bukti pengeluaran tertanggal tahun 2016 atau sebelumnya tersebut, satker membuat jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	391119	Koreksi Lainnya	xxx	
K	111827	Kas dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan		xxx

- 2) Jika penggunaan uang yang berasal dari hibah langsung pada tahun 2016 atau sebelumnya menghasilkan aset, maka berdasarkan bukti-bukti pengeluaran tertanggal tahun 2016 atau sebelumnya tersebut, satker membuat jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	117xxx/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang belum Diregister	xxx	
K	111827	Kas dari Hibah Langsung yang Belum Disahkan		xxx

Selanjutnya berdasarkan bukti perolehan, satker merekam aset tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN dan menyajikan di Neraca sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pada Aplikasi

Persediaan dan/atau SIMAK-BMN apabila BAST atas perolehan aset tertanggal tahun 2016 atau sebelumnya dilakukan melalui menu Saldo Awal. Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN:

D	11xxxx/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	
K	391113/ 391116/ 391118	Koreksi Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi		xxx

Pada saat jurnal tersebut diterima di Aplikasi SAIBA, Satker agar membuat jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	391113/ 391116/ 391118	Koreksi Nilai Persediaan/ Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	xxx	
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister		xxx

Atas penggunaan dana hibah langsung uang baik pada tahun anggaran 2017 maupun tahun anggaran 2016 atau sebelumnya, satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang belum Disahkan di dalam Neraca per 31 Desember 2017 dan mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK, termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2017.

6. Hibah Langsung Barang/Jasa yang sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2017 Belum Dilakukan Pengesahan

Terkait hibah langsung berupa barang/jasa berharga yang belum disahkan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017, terdapat beberapa kondisi yaitu:

- a. **Atas hibah langsung berupa barang dan jasa tersebut sudah diterima dengan BAST dan satker telah mencatat Beban/Aset serta Hibah Langsung yang Belum Disahkan sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat**

Atas kondisi ini, Satker tetap menyajikan Hibah Langsung yang Belum Disahkan di dalam Neraca per 31 Desember 2017 dan mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK, termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017.

- b. **Atas hibah langsung berupa barang/jasa tersebut sudah diterima dengan BAST tertanggal tahun anggaran 2017 dan satker belum mencatat Aset/Beban.**

Satker agar melakukan pencatatan hibah barang/jasa pada Aplikasi SAIBA, Aplikasi Persediaan, dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN sesuai PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Pada Aplikasi SAIBA, lakukan jurnal manual sebagai berikut:

D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister	xxx	
K	218211	Hibah Langsung yang belum Disahkan		xxx

Selanjutnya Satker merekam aset tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN dan menyajikan di Neraca sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN apabila BAST atas perolehan aset tersebut tertanggal tahun 2017 dilakukan melalui menu Hibah Masuk. Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN:

D	11xxxx/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister		xxx

Apabila sampai dengan 31 Desember 2017 belum dilakukan pengesahan, satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dan mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK, termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2017.

- c. **Atas hibah langsung berupa barang/jasa tersebut sudah diterima dengan BAST tertanggal tahun 2016 atau tahun sebelumnya, dan satker belum mencatat Aset/Beban.**

Satker membuat jurnal pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

1) Hibah langsung berupa barang

Apabila atas hibah langsung berupa barang yang telah diterima dengan BAST tertanggal tahun 2016 atau tahun sebelumnya dan satker belum melakukan pencatatan aset, maka satker membuat jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister	xxx	
K	218211	Hibah Langsung yang belum Disahkan		xxx

Selanjutnya, satker merekam aset tersebut ke dalam Aplikasi Persediaan dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN dan menyajikan di Neraca sepanjang memenuhi kriteria kapitalisasi. Pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN apabila BAST atas perolehan aset tersebut tertanggal tahun 2016 atau tahun sebelumnya dilakukan melalui menu Hibah Masuk. Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK-BMN:

D	11xxxx/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx	
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister		xxx

Apabila sampai dengan 31 Desember 2017 belum dilakukan pengesahan, satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK, termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2017.

2) Hibah langsung berupa jasa

Apabila atas hibah langsung berupa jasa yang telah diterima dengan BAST tertanggal tahun 2016 atau tahun sebelumnya satker belum melakukan pencatatan beban, maka satker membuat jurnal secara manual pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	391119	Koreksi Lainnya	xxx	
K	218211	Hibah Langsung Yang Belum Disahkan		xxx

Apabila sampai dengan 31 Desember 2017 belum dilakukan pengesahan, Satker tetap menyajikan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan dan mengungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan termasuk penjelasan atas belum dilakukannya pengesahan sampai dengan akhir tahun 2017.

7. Rekapitulasi Saldo Akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan

Dalam rangka penyusunan LKKL dan LKPP tahun 2017, Kementerian Negara /Lembaga wajib mengungkapkan saldo hibah langsung yang belum disahkan secara memadai dalam CaLK. Selain itu, satker agar melampirkan rekapitulasi saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan per 31 Desember 2017, baik yang terbentuk dari hibah langsung uang maupun hibah langsung barang/jasa, dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah saldo akun/pos Hibah Langsung yang Belum Disahkan yang berasal dari tahun 2016 dan tahun sebelumnya (saldo awal tahun 2017).
- Jumlah saldo akun/pos Hibah Langsung yang belum Disahkan yang terbentuk pada tahun 2017.
- Jurnal balik dan/atau koreksi saldo apabila terdapat rekomendasi dari BPK RI, misalnya akibat penyetoran saldo hibah yang belum digunakan ke Donor atau ke Kas Negara.
- Adapun format rekapitulasi saldo Akun Hibah Langsung yang belum disahkan adalah sebagaimana terlampir.

8. Pertanggungjawaban UP/TUP tahun 2017 yang diajukan pada tahun 2018

Dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir tahun Anggaran 2017 Pasal 21 Pasal 21 Ayat (6), disebutkan apabila satker tidak/belum menyampaikan pertanggungjawaban UP/TUP sampai dengan batas akhir penyampaian

pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2017 yang disebabkan UP/TUP tahun anggaran 2017 telah dibelanjakan namun terlambat dipertanggungjawabkan, maka:

- a. UP/TUP tahun anggaran 2017 yang belum dipertanggungjawabkan dapat diperhitungkan dengan UP tahun 2018.
- b. Bukti pengeluaran UP/TUP tahun anggaran 2017 dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2018 melalui mekanisme tunggakan.
- c. Satker melakukan revisi DIPA tahun anggaran 2018 untuk menampung bukti pengeluaran UP/TUP tahun anggaran 2017 tersebut dan mencantumkan dalam halaman IV DIPA.

Perlakuan akuntansi atas pertanggungjawaban UPT/TUP tahun 2017 yang diajukan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal penyesuaian atas belanja UP/TUP tahun 2017 yang menghasilkan aset

Atas transaksi ini, satker melakukan perekaman pada Aplikasi Persediaan dan/atau Aplikasi SIMAK-BMN ketika barang diterima sesuai BAST tertanggal tahun 2017 melalui menu Perolehan. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

D	117xxx/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	xxx	
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister		xxx

Ketika sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, satker belum mempertanggungjawabkan UP/TUP tahun 2017 tersebut, satker membuat jurnal penyesuaian secara manual pada Aplikasi SAIBA dengan tanggal buku 31 Desember 2017 sebagai berikut:

D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxx	
K	212112/ 212113	Belanja Barang/Modal yang Masih Harus Dibayar		xxx

- b. Jurnal penyesuaian atas belanja UP/TUP yang tidak menghasilkan aset

Ketika sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, satker belum mempertanggungjawabkan UP/TUP tahun 2017 tersebut, satker membuat jurnal penyesuaian secara manual pada Aplikasi SAIBA dengan tanggal buku 31 Desember 2017 sebagai berikut:

D	59xxx	Beban xxx	xxx	
K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		xxx

- c. Jurnal balik pada tahun 2018

Sesuai dengan pengaturan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016, Belanja yang Masih Harus Dibayar merupakan salah satu jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan

jurnal balik pada awal periode berikutnya. Dengan demikian, pada awal tahun 2018 satker melakukan jurnal balik secara manual melalui Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

- 1) Untuk Belanja UP/TUP yang menghasilkan aset, dilakukan jurnal balik sebagai berikut:

D	212112/ 212113	Belanja Barang/Modal yang Masih Harus Dibayar	xxx	
K	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister		xxx

Selanjutnya, ketika telah terbit SP2D sebagai pertanggungjawaban atas belanja tersebut, satker melakukan perekaman pada Aplikasi SAIBA sehingga secara otomatis terbentuk jurnal:

Jurnal Kas

D	5xxxx	Belanja Barang/Modal	xxx	
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Jurnal Akrua

D	117911/ 13xxxx/ 16xxxx	Persediaan/Aset Tetap/ Aset Lainnya yang Belum Diregister	xxx	
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Saldo Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister di sisi kredit yang muncul ketika dilakukan jurnal balik pada awal tahun 2018 akan tereliminasi secara otomatis ketika SP2D direkam pada Aplikasi SAIBA.

Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan interim tahun 2018 belum dilakukan pengajuan pertanggungjawaban dan belum terbit SP2D, saldo akun Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister di sisi kredit yang muncul akibat dilakukannya jurnal balik akan tervalidasi sebagai jurnal tidak lazim dan/atau saldo tidak normal pada Aplikasi e-Rekon&LK. Atas hal ini, satker harus dapat memberikan penjelasan secara memadai.

- 2) Untuk belanja UP/TUP yang tidak menghasilkan aset, dilakukan jurnal balik sebagai berikut:

D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	xxx	
K	59xxx	Beban xxx		xxx

Selanjutnya, ketika telah terbit SP2D sebagai pertanggungjawaban atas belanja tersebut, satker melakukan perekaman pada Aplikasi SAIBA sehingga secara otomatis terbentuk jurnal:

Jurnal Kas

D	5xxxx	Belanja xxx	xxx	
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

7

Jurnal Akrua

D	59xxx	Beban xxx	xxx	
K	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Saldo Beban di sisi kredit yang muncul ketika dilakukan jurnal balik pada awal tahun 2018 akan tereliminasi secara otomatis ketika SP2D direkam pada Aplikasi SAIBA.

Apabila sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan interim tahun 2018 belum dilakukan pengajuan pertanggungjawaban dan belum terbit SP2D, saldo Beban di sisi kredit yang muncul akibat dilakukannya jurnal balik akan tervalidasi sebagai jurnal tidak lazim dan/atau saldo tidak normal pada Aplikasi e-Rekon&LK. Atas hal ini, satker harus dapat memberikan penjelasan secara memadai.

y

Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga Tahun 2017 *Unaudited*

A. Bagi K/L yang menyampaikan LKKL **paling lambat 28 Februari 2018.**

1. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA bulan Desember 2017 (Tahun 2017 *Unaudited*) adalah dari tanggal 5 s.d. 25 Januari 2018 dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 1 s.d. 23 Januari 2018 *open period upload* ADK;
 - b. Tanggal 24 s.d. 25 Januari 2018 *closed period upload* ADK;
 - c. Tanggal 5 s.d. 25 Januari 2018 merupakan masa penyelesaian rekonsiliasi;
 - d. Apabila sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 satker belum menyelesaikan rekonsiliasi (status rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK belum memperoleh status "menunggu TTD KPA"), satker akan dikenakan sanksi mulai tanggal 26 Januari 2018, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017.
2. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang telah terbit pada periode tanggal 5 s.d. 25 Januari 2018 masih dapat terjadi pembatalan (*reset BAR*) apabila terdapat dokumen/data transaksi maupun pengesahan pendapatan dan belanja setelah tanggal penerbitan BAR. Atas kondisi tersebut, Satker wajib melakukan *upload* ulang untuk dilakukan rekonsiliasi ulang serta diterbitkan BAR ulang dari KPPN.
3. Jadwal penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2017 *unaudited* diatur sebagai berikut:

No.	Tingkat Unit Akuntansi/Pelaporan	Jadwal <i>Upload</i> ADK Satker ke E-Rekon&LK (<i>open period</i>)	Waktu Penyusunan dan Penyampaian LK (<i>closed period</i>)
1.	UAKPA	1 Jan – 23 Jan 2018	24 Jan - 25 Jan 2018
2.	UAPPA-W	26 Jan – 5 Feb 2018	6 Feb – 7 Feb 2018
3.	UAPPA-E1	8 Feb – 14 Feb 2018	15 Feb – 19 Feb 2018
4.	UAPA	20 Feb – 22 Feb 2018	23 Feb – 28 Feb 2018

4. Bagi Satker yang telah mendapatkan BAR dan akan melakukan *upload* ulang ke e-Rekon&LK agar terlebih dahulu mengajukan permohonan reset BAR ke KPPN secara tertulis atau dapat melalui menu Beranda tombol *Refresh* pada kolom aksi di aplikasi e-Rekon&LK dengan menggunakan *user* KPA, kemudian menyampaikan informasi permohonan reset BAR ke KPPN melalui sarana komunikasi elektronik.
5. Jadwal *open period* dan *closed period upload* ADK ke aplikasi e-Rekon&LK dalam rangka penyusunan LK tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA di luar jadwal di atas, dapat diberikan dengan memperhatikan batas akhir penyampaian LKKL Tahun 2017 *Unaudited* pada tanggal 28 Februari 2018. Jadwal *open period* dan *closed period* di luar jadwal di atas akan dilaksanakan berdasarkan permintaan Kementerian Negara/Lembaga kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui sarana tercepat (surat elektronik bai.dit.apk@gmail.com /via pos/diantar langsung).
6. Jadwal *open period* dan *closed period upload* ADK ke aplikasi e-Rekon&LK dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2017 *Audited* akan diatur lebih lanjut.

B. Bagi K/L yang menyampaikan LKKL paling lambat 21 Februari 2018.

1. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA bulan Desember 2017 (Tahun 2017 *Unaudited*) adalah dari tanggal 5 s.d. 25 Januari 2018 dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 1 s.d. 23 Januari 2018 *open period upload* ADK;
 - b. Tanggal 24 s.d. 25 Januari 2018 *closed period upload* ADK;
 - c. Tanggal 5 s.d. 25 Januari 2018 merupakan masa penyelesaian rekonsiliasi;
 - d. Apabila sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 satker belum menyelesaikan rekonsiliasi (status rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK belum memperoleh status "menunggu TTD KPA"), satker akan dikenakan sanksi mulai tanggal 26 Januari 2018, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017.
2. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang telah terbit pada periode tanggal 5 s.d. 25 Januari 2018 masih dapat terjadi pembatalan (*reset* BAR) apabila terdapat dokumen/data transaksi maupun pengesahan pendapatan dan belanja setelah tanggal penerbitan BAR. Atas kondisi tersebut, Satker wajib melakukan *upload* ulang untuk dilakukan rekonsiliasi ulang serta diterbitkan BAR ulang dari KPPN.
3. Jadwal penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 2017 *unaudited* diatur sebagai berikut:

No.	Tingkat Unit Akuntansi/Pelaporan	Jadwal Upload ADK Satker ke E-Rekon&LK (<i>open period</i>)	Waktu Penyusunan dan Penyampaian LK (<i>closed period</i>)
1.	UAKPA	1 Jan - 23 Jan 2018	24 Jan - 25 Jan 2018
2.	UAPA	26 Jan - 14 Feb 2018	15 Feb - 21 Feb 2018

4. Bagi Satker yang telah mendapatkan BAR dan akan melakukan *upload* ulang ke e-Rekon&LK agar terlebih dahulu mengajukan permohonan reset BAR ke KPPN secara tertulis atau dapat melalui menu Beranda tombol *Refresh*  pada kolom aksi di aplikasi e-Rekon&LK dengan menggunakan *user* KPA, kemudian menyampaikan informasi permohonan reset BAR ke KPPN melalui sarana komunikasi elektronik.
5. Jadwal *open period* dan *closed period upload* ADK ke aplikasi e-Rekon&LK dalam rangka penyusunan LK tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1, dan UAPA di luar jadwal di atas, dapat diberikan dengan memperhatikan batas akhir penyampaian LKKL Tahun 2017 *Unaudited* pada tanggal 21 Februari 2018. Jadwal *open period* dan *closed period* di luar jadwal di atas akan dilaksanakan berdasarkan permintaan Kementerian Negara/Lembaga kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan melalui sarana tercepat (surat elektronik bai.dit.apk@gmail.com /via pos/diantar langsung).
6. Jadwal *open period* dan *closed period upload* ADK ke aplikasi e-Rekon&LK dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2017 *Audited* akan diatur lebih lanjut. y

Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap

A. Latar Belakang

Latar belakang pelaksanaan dan pengungkapan penilaian kembali (Revaluasi) Aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa "Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian." Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa "Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air,pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015." Termasuk dalam ruang lingkup aset tetap yang direvaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan, pada paragraf 42 menyatakan bahwa "***Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***"
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada paragraf 82 menyatakan bahwa "Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, LKKL harus mengungkapkan secara memadai atas perubahan kebijakan akuntansi berupa Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada CaLK. Huruf B Lampiran ini menyajikan ilustrasi pengungkapan yang diperlukan. Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik dan jenis transaksinya.

B. Ilustrasi Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

.....

Aset

(1) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

.....

Aset Tetap

(a). Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada

2

Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Tanah

Rp42.938.114.000

C.16 Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp42.938.114.000. dan Rp18.000.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

↳

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp	18.000.000.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	18.338.114.000
Selisih revaluasi aset	Rp	6.000.000.000
Hibah	Rp	600.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	42.938.114.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp	42.938.114.000

Mutasi tambah:

- Pembelian tanah pada tahun 2016 berlokasi di tiga provinsi yaitu: Medan, Jawa Timur dan Bali.
- Hibah berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Revaluasi atas tanah dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp6.000.000.000 yang terdapat pada:

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Administrasi	Rp 4.000.000.000
2	Deputi Akuntansi	Rp 1.000.000.000
3	Sekretariat	Rp 1.000.000.000

Gedung dan Bangunan C.18 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp52.970.000.000 Rp39.679.400.000 dan Rp42.000.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	42.000.000.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	5.250.000.000
Revaluasi Aset	5.000.000.000
Koreksi pencatatan	900.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	(180.000.000)
Saldo per 31 Desember 2017	52.970.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(13.290.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	39.679.400.000

Mutasi tambah:

- Pembangunan gedung berupa, pembanguan dua gedung yang akan digunakan sebagai kantor wilayah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
- Koreksi tambah sebesar Rp900.000.000 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.
- Revaluasi atas Gedung dan Bangunan dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp5.000.000.000 yang terdapat pada:

No	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Akuntansi	Rp 1.500.000.000
2	Sekretariat	Rp 3.500.000.000

Mutasi kurang:

- Koreksi kurang sebesar Rp180.000.000 tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp2.140.000.000

C.19 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.040.000.000 dan Rp300.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

9

Saldo per 31 Desember 2016	300.000.000
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jalan Khusus Komplek	1.740.000.000
Revaluasi Aset	100.000.000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2017	2.140.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(386.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	1.754.000.000

Mutasi tambah:

- Berupa pengembangan Jalan Khusus Komplek di seluruh lingkup Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.
- Revaluasi atas Jalan, Jaringan, Irigasi dilaksanakan pada semester II tahun 2017 dengan selisih nilai revaluasi sebesar Rp 100.000.000 terdapat pada Sekretariat.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan dan Akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp11.100.000.000

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp11.100.000.000 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

✓

TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Telaah Laporan Keuangan adalah suatu kegiatan memeriksa laporan keuangan oleh penyusun laporan keuangan untuk meyakini keandalan laporan keuangan yang disusunnya sebelum disampaikan ke jenjang/unit akuntansi di atasnya.

Seluruh penyusun laporan keuangan, mulai dari level UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, UAPA, hingga penyusun LKPP melakukan penelaahan laporan keuangan. Pereviu laporan keuangan (APIP) dapat juga menggunakan telaah laporan keuangan ini sebagai tambahan dalam melakukan reviu atas laporan keuangan. Dengan adanya aplikasi e-Rekon&LK, Telaah Laporan Keuangan dapat dilakukan setiap saat sepanjang masa penyusunan laporan keuangan. Beberapa telaah yang dahulunya dilakukan secara manual, dengan memanfaatkan aplikasi e-Rekon&LK telaah dapat dimonitor melalui aplikasi e-Rekon&LK.

Telaah Laporan Keuangan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga keandalan Laporan Keuangan. Kementerian Keuangan telah membuat contoh Format Kertas Kerja Telaah laporan Keuangan yang dapat disesuaikan (ditambah dan dikurang) sesuai level Satker/Wilayah/Es.1, dan atau K/L dengan:

- a. perubahan kebijakan akuntansi;
- b. perubahan aplikasi penyusunan Laporan Keuangan;
- c. kondisi dan karakteristik masing-masing Satker/Wilayah/Eselon-1/Kementerian Negara/Lembaga.

Kertas Kerja disusun dengan memberi tanda pada kolom isian "sama/tidak sama" atau "ada/tidak ada". Bila tidak terdapat datanya, diisi dengan N/A (*Not Available*). Pada kertas Kerja juga terdapat kolom pengisian "yang seharusnya". Hal ini karena Telaah Laporan Keuangan berfungsi sebagai pencegahan dini atas potensi terjadinya kesalahan. Apabila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, hal ini merupakan indikasi kuat terdapat suatu kesalahan walaupun belum tentu salah, agar lakukan:

- a. Teliti apakah terjadi kesalahan? Jika ya, lakukan perbaikan pada sumber/satker yang salah, *upload* ulang perbaikannya, kemudian lakukan telaah laporan keuangan kembali.
- b. Apabila kesalahan tidak dapat diperbaiki, konsultasikan dengan unit akuntansi di atasnya untuk dicarikan solusi, jelaskan dalam Lampiran Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan.

Jika perlu, Kertas Kerja telaah laporan keuangan dilampirkan dalam lampiran pendukung laporan keuangan di tiap jenjang laporan keuangan.

Contoh Format Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan terdapat pada halaman berikut ini.

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN 2017 *UNAUDITED***

Kode BA dan Nama K/L: (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP (didukung bukti reviu PIPK sesuai PMK 14/PMK.09/2017)			Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab			Ada
3. LRA <i>face</i>			Ada
4. Neraca <i>face</i>			Ada
5. Laporan Operasional <i>face</i>			Ada
7. Laporan Perubahan Ekuitas <i>face</i>			Ada
8. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
9. Neraca Percobaan Akrual			Ada
10. Neraca Percobaan Kas			Ada
11. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada

KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Periksa semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) apakah sama dengan e-Rekon&LK			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "			Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE			Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca			Sama
4. Pada LPE, apakah " <i>Ekuitas Awal</i> " + " <i>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</i> " = " <i>Ekuitas Akhir</i> "			Sama
<i>Apabila perhitungan no.4 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satket melakukan jurnal menggunakan akun 391111, cari Satkernya menggunakan e-Rekon&LK kemudian perbaiki</i>			

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

Pengecekan Saldo yang Tidak Normal Posisi Debet/Kreditnya	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun <i>Beban Penyisihan Piutang</i>			Tidak

Pengecekan Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
Akun "Belum diregister"				
1.	Adakah akun "Belum Diregister"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Aset Belum Diregister"			Tidak
<i>Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada</i>				
Akun "Aset ,KDP, Penyusutan/Amortisasi dan Beban terkait Aset BLU"				
1.	Adakah akun "Persediaan, Aset, KDP, dan Beban terkait Aset BLU"			Tidak
2.	Adakah akun " Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi Aset Tak Berwujud terkait Aset BLU" (termasuk akumulasi penyusutan/amortisasi atas penghentian aset tetap/aset tak berwujud)			Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>				
Akun Ekuitas (3xxxxx)				
1.	Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI</i>			Tidak
2.	Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak
Akun Perpajakan (41xxxx)				
1.	Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) <i>kecuali BA.015.04 ?</i>			Tidak
Akun Khusus BUN (Tidak boleh ada di KL)				
1.	Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (<i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN</i>)			Tidak
Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:				
2.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)			Tidak
3.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
4.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
5.	Akun 423954/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL			Tidak
6.	Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
7.	Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)			Tidak
8.	Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)			Tidak
9.	Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)			Tidak
10.	Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-lain)			Tidak
<i>Selain akun2 diatas, masih ada akun2 khusus BUN, seperti 421611, 423252, 423253, 423254, 423341, dll)</i>				
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas				
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (<i>misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan ternyata terdapat pada Kementerian Kesehatan</i>)			Tidak
2.	Adakah akun 423319 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (<i>seharusnya 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))</i>)			Tidak
Jika Tidak Memiliki Satker BLU				
1.	Adakah akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian BLU?			Tidak
2.	Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
4.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak

Hibah Langsung		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun ?			Ya/Tidak
2.	Apakah Saldo Akun "Hibah langsung yang belum disahkan" pada akhir tahun sama nilainya dengan Saldo Awal 2017 ?			Ya
<i>Jika lebih kecil, kemungkinan ada jurnal yang mengurangi akun 218211 (cek apakah jurnal tsb. Benar), jika lebih besar, kemungkinan ada hibah langsung tahun 2017 yang belum disahkan (Segera disahkan)</i>				
3.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya

Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK	Rp.		
2.	Jika kolom No.1 bernilai positif, adakah TM dari KL lain senilai tsb.?			Ya
3.	Jika kolom No.1 bernilai negatif, adakah TK ke KL lain senilai tsb. ?			Ya
<i>Lakukan telaah menggunakan e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar)</i>				

Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, mungkinkah mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya/Tidak

Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp.		
2.	Apakah selisih nilai diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3.	Adakah beban bunga			Tidak
4.	Adakah beban subsidi			Tidak
5.	Adakah beban hibah			Tidak
6.	Adakah beban transfer			Tidak
7.	Adakah beban lain-lain			Tidak

Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif?			Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
11.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?			Tidak
2. Adakah saldo akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?			Ada/Tidak
<i>Bila ada "Selisih Revaluasi Aset tetap" apakah benar ada Penilaian Kembali/Revaluasi BMN dari DJKN/KPKNL?</i>			Ada
Pengecekan akun koreksi			
Cetak seluruh akun koreksi per Satker dari e-Rekon&LK (Menu Rincian >> Rincian LK >> Daftar Saldo Akrua), yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Adakah pos "Belum Diregister"?			Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahun 2017 dengan 2016, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2016, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)			Ada
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)			Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
6. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya

Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
7. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (423141/2/3 atau 42492x) ?			Ada/Tidak
- Ada pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?			Ada/Tidak
8. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua akun di Neraca LKKL sama dengan di L-BMN?			Ya
<i>Jika telah menggunakan SIMAK e-Rekon (e-Rekon&LK G2) maka lihat pada menu "monitoring >> rekon internal"</i>			
2. Apakah menurut e-Rekon-Ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
<i>Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? lakukan pengecekan</i>			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-Ik menu daftar >> pagu minus")			Tidak
2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
3. Adakah TDK pada Aplikasi e-Rekon&LK ? (Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi") atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif maupun Tidak Aktif ?			Tidak

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?			Ya
2. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
3. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
4. Adakan PNBPN digunakan langsung?			Tidak
5. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
7. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
3. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
4. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

()
NIP

.....

Penelaah,

()
NIP

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT ESELON I
TAHUN 2017 *UNAUDITED*

Kode BAEs1 dan Nama Eselon I/K/L: (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA <i>face</i>			Ada
2. Neraca <i>face</i>			Ada
3. Laporan Operasional <i>face</i>			Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas <i>face</i>			Ada
5. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
6. Neraca Percobaan Akrual			Ada
7. Neraca Percobaan Kas			Ada
8. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada

KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Periksa semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) apakah sama dengan e-Rekon&LK			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "			Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE			Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca			Sama
4. Pada LPE, apakah " <i>Ekuitas Awal</i> " + " <i>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</i> " = " <i>Ekuitas Akhir</i> "			Sama
<i>Apabila perhitungan no.4 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satket melakukan jurnal menggunakan akun 391111, cari Satkernya menggunakan e-Rekon&LK kemudian perbaiki</i>			

NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo yang Tidak Normal Posisi Debet/Kreditnya	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun <i>Beban Penyisihan Piutang</i>			Tidak

Pengecekan Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
Akun "Belum diregister"			
1. Adakah akun "Belum Diregister"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Aset Belum Diregister"			Tidak
<i>Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada</i>			

Akun "Aset , KDP, Penyusutan/Amortisasi dan Beban terkait Aset BLU"	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Persediaan, Aset, KDP, dan Beban terkait Aset BLU"			Tidak
2. Adakah akun " Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi Aset Tak Berwujud terkait Aset BLU" (termasuk akumulasi penyusutan/amortisasi atas penghentian aset tetap/aset tak berwujud)			Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>			

Akun Ekuitas (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
2. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak

Akun Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?			Tidak

Akun Khusus BUN (Tidak boleh ada di KL)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)			Tidak

Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:

	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			Tidak
3. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
4. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
5. Akun 423954/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL			Tidak
6. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
7. Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)			Tidak
8. Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)			Tidak
9. Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)			Tidak
10 Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-lain)			Tidak

Selain akun2 diatas, masih ada akun2 khusus BUN, seperti 421611, 423252, 423253, 423254, 423341, dll)

Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaa ternyata terdapat pada Kementerian Kesehatan)			Tidak
2. Adakah akun 423319 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (seharusnya 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))			Tidak

Jika Tidak Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian BLU?			Tidak
2. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
3. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
4. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak

Hibah Langsung		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun ?			Ya/Tidak
2.	Apakah Saldo Akun "Hibah langsung yang belum disahkan" pada akhir tahun sama nilainya dengan Saldo Awal 2017 ?			Ya
<i>Jika lebih kecil, kemungkinan ada jurnal yang mengurangi akun 218211 (cek apakah jurnal tsb. Benar), jika lebih besar, kemungkinan ada hibah langsung tahun 2017 yang belum disahkan (Segera disahkan)</i>				
3.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK	Rp.		
2.	Jika kolom No.1 bernilai positif, adakah TM dari KL lain senilai tsb.?			Ya
3.	Jika kolom No.1 bernilai negatif, adakah TK ke KL lain senilai tsb. ?			Ya
<i>Lakukan telaah menggunakan e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar)</i>				
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?			Ya/Tidak
2.	Jika ada, mungkinkah mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya/Tidak
Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp.		
2.	Apakah selisih nilai diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3.	Adakah beban bunga			Tidak
4.	Adakah beban subsidi			Tidak
5.	Adakah beban hibah			Tidak
6.	Adakah beban transfer			Tidak
7.	Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif?			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>				
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
11.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>				

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?			Tidak
2. Adakah saldo akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?			Ada/Tidak
<i>Bila ada "Selisih Revaluasi Aset tetap" apakah benar ada Penilaian Kembali/Revaluasi BMN dari DJKN/KPKNL?</i>			Ada
Pengecekan akun koreksi			
Cetak seluruh akun koreksi per Satker dari e-Rekon&LK (Menu Rincian >> Rincian LK >> Daftar Saldo Akrua), yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Adakah pos "Belum Diregister"?			Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahun 2017 dengan 2016, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2016, Apakah demikian?			Ya

TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)			Ada
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)			Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
6. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya

Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
7. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (423141/2/3 atau 42492x) ?			Ada/Tidak
- Ada pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?			Ada/Tidak
8. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua akun di Neraca LKKL sama dengan di L-BMN?			Ya
<i>Jika telah menggunakan SIMAK e-Rekon (e-Rekon&LK G2) maka lihat pada menu "monitoring >> rekon internal"</i>			
2. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
<i>Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? lakukan pengecekan</i>			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")			Tidak
2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
3. Adakah TDK pada Aplikasi e-Rekon&LK ? (Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi") atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif maupun Tidak Aktif ?			Tidak

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?			Ya
2. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
3. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
4. Adakah PNBPN digunakan langsung?			Tidak
5. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
7. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
3. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
4. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

(
NIP)

.....

Penelaah,

(
NIP)

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT WILAYAH
TAHUN 2017 *UNAUDITED***

Kode BAEs1wilayah dan Nama Eselon I/wilayah/ KL: (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA <i>face</i>			Ada
2. Neraca <i>face</i>			Ada
3. Laporan Operasional <i>face</i>			Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas <i>face</i>			Ada
5. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
6. Neraca Percobaan Akruwal			Ada
7. Neraca Percobaan Kas			Ada
8. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada

KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Periksa semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) apakah sama dengan e-Rekon&LK			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI

Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "			Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE			Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca			Sama
4. Pada LPE, apakah " <i>Ekuitas Awal</i> " + " <i>Kenaikan/ Penurunan Ekuitas</i> " = " <i>Ekuitas Akhir</i> "			Sama
<i>Apabila perhitungan no.4 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satket melakukan jurnal menggunakan akun 391111, cari Satkernya menggunakan e-Rekon&LK kemudian perbaiki</i>			

NERACA PERCOBAAN AKRUAL

Pengecekan Saldo yang Tidak Normal Posisi Debet/Kreditnya	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun <i>Beban Penyisihan Piutang</i>			Tidak

Pengecekan Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
Akun "Belum diregister"			
1. Adakah akun "Belum Diregister"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Aset Belum Diregister"			Tidak
<i>Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada</i>			

Akun "Aset , KDP, Penyusutan/Amortisasi dan Beban terkait Aset BLU"	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Persediaan, Aset, KDP, dan Beban terkait Aset BLU"			Tidak
2. Adakah akun " Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi Aset Tak Berwujud terkait Aset BLU" (termasuk akumulasi penyusutan/amortisasi atas penghentian aset tetap/aset tak berwujud)			Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>			

Akun Ekuitas (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI</i>			Tidak
2. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak

Akun Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) <i>kecuali BA.015.04 ?</i>			Tidak

Akun Khusus BUN (Tidak boleh ada di KL)	Ada	Tidak	Seharusnya
---	-----	-------	------------

1. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? <i>(Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)</i>			Tidak
--	--	--	-------

<i>Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
---	-----	-------	------------

2. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka <i>(prepaid)</i>			Tidak
---	--	--	-------

3. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
---	--	--	-------

4. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
---	--	--	-------

5. Akun 423954/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL			Tidak
--	--	--	-------

6. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
--	--	--	-------

7. Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)			Tidak
-------------------------------------	--	--	-------

8. Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)			Tidak
---------------------------------------	--	--	-------

9. Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)			Tidak
-------------------------------------	--	--	-------

10 Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-lain)			Tidak
---	--	--	-------

<i>Selain akun2 diatas, masih ada akun2 khusus BUN, seperti 421611, 423252, 423253, 423254, 423341, dll)</i>			
--	--	--	--

Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
---	-----	-------	------------

1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? <i>(misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaa ternyata terdapat pada Kementerian Kesehatan)</i>			Tidak
---	--	--	-------

2. Adakah akun 423319 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>(seharusnya 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))</i>			Tidak
--	--	--	-------

Jika Tidak Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
--------------------------------	-----	-------	------------

1. Adakah akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian BLU?			Tidak
--	--	--	-------

2. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
--	--	--	-------

3. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
---	--	--	-------

4. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
---	--	--	-------

Hibah Langsung	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun ?			Ya/Tidak
2. Apakah Saldo Akun "Hibah langsung yang belum disahkan" pada akhir tahun sama nilainya dengan Saldo Awal 2017 ?			Ya
<i>Jika lebih kecil, kemungkinan ada jurnal yang mengurangi akun 218211 (cek apakah jurnal tsb. Benar), jika lebih besar, kemungkinan ada hibah langsung tahun 2017 yang belum disahkan (Segera disahkan)</i>			
3. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK	Rp.		
2. Jika kolom No.1 bernilai positif, adakah TM dari KL lain senilai tsb.?			Ya
3. Jika kolom No.1 bernilai negatif, adakah TK ke KL lain senilai tsb. ?			Ya
<i>Lakukan telaah menggunakan e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar)</i>			
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?			Ya/Tidak
2. Jika ada, mungkinkah mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya/Tidak
Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp.		
2. Apakah selisih nilai diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif?			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
11. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?			Tidak
2. Adakah saldo akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?			Ada/Tidak
<i>Bila ada "Selisih Revaluasi Aset tetap" apakah benar ada Penilaian Kembali/Revaluasi BMN dari DJKN/KPKNL?</i>			Ada
Pengecekan akun koreksi			
Cetak seluruh akun koreksi per Satker dari e-Rekon&LK (Menu Rincian >> Rincian LK >> Daftar Saldo Akrua), yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Adakah pos "Belum Diregister"?			Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahun 2017 dengan 2016, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2016, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)			Ada
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)			Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
6. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya

Pengecekan Jurnal AkruaI	Ada	Tidak	Seharusnya
7. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (423141/2/3 atau 42492x) ?			Ada/Tidak
- Ada pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?			Ada/Tidak
8. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua akun di Neraca LKKL sama dengan di L-BMN?			Ya
<i>Jika telah menggunakan SIMAK e-Rekon (e-Rekon&LK G2) maka lihat pada menu "monitoring >> rekon internal"</i>			
2. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
<i>Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? lakukan pengecekan</i>			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (<i>Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus</i>)			Tidak
2. Ada uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
3. Adakah TDK pada Aplikasi e-Rekon&LK ? (Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi) atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif maupun Tidak Aktif ?			Tidak

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?			Ya
2. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
3. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
4. Adakah PNBP digunakan langsung?			Tidak
5. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
7. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
3. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
4. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

(
NIP)

.....

Penelaah,

(
NIP)

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
TAHUN 2017 *UNAUDITED***

Kode BAEs1WilayahSatker dan Nama Satker/Eselon I/wilayah/ KL: (.....)

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Tidak	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)			
1. LRA <i>face</i>			Ada
2. Neraca <i>face</i>			Ada
3. Laporan Operasional <i>face</i>			Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas <i>face</i>			Ada
5. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
6. Neraca Percobaan AkruaI			Ada
7. Neraca Percobaan Kas			Ada
8. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Periksa semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) apakah sama dengan e-Rekon&LK			Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "			Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE			Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca			Sama
4. Pada LPE, apakah " <i>Ekuitas Awal</i> " + " <i>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</i> " = " <i>Ekuitas Akhir</i> "			Sama
<i>Apabila perhitungan no.4 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satket melakukan jurnal menggunakan akun 391111, cari Satkernya menggunakan e-Rekon&LK kemudian perbaiki</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo yang Tidak Normal Posisi Debet/Kreditnya	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun <i>Beban Penyisihan Piutang</i>			Tidak

Pengecekan Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
Akun "Belum diregister"				
1.	Adakah akun "Belum Diregister"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Aset Belum Diregister"			Tidak
<i>Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada</i>				

Akun "Aset , KDP, Penyusutan/Amortisasi dan Beban terkait Aset BLU"		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Persediaan, Aset, KDP, dan Beban terkait Aset BLU"			Tidak
2.	Adakah akun " Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi Aset Tak Berwujud terkait Aset BLU" (termasuk akumulasi penyusutan/amortisasi atas penghentian aset tetap/aset tak berwujud)			Tidak
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>				

Akun Ekuitas (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI			Tidak
2.	Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak

Akun Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA.015.04 ?			Tidak

Akun Khusus BUN (Tidak boleh ada di KL)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)			Tidak

Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:		Ada	Tidak	Seharusnya
2.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)			Tidak

3.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain			Tidak
4.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak

5.	Akun 423954/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL			Tidak
----	---	--	--	-------

6.	Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
----	---------------------------------------	--	--	-------

7.	Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)			Tidak
----	----------------------------------	--	--	-------

8.	Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)			Tidak
----	------------------------------------	--	--	-------

9.	Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)			Tidak
----	----------------------------------	--	--	-------

10	Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-lain)			Tidak
----	--------------------------------------	--	--	-------

Selain akun2 diatas, masih ada akun2 khusus BUN, seperti 421611, 423252, 423253, 423254, 423341, dll)

Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan ternyata terdapat pada Kementerian Kesehatan)			Tidak
2.	Adakah akun 423319 Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? (seharusnya 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro))			Tidak

Jika Tidak Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian BLU?			Tidak

2.	Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
----	-------------------------------------	--	--	-------

3.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
----	--	--	--	-------

4.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
----	--	--	--	-------

Hibah Langsung	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun ?			Ya/Tidak
2. Apakah Saldo Akun "Hibah langsung yang belum disahkan" pada akhir tahun sama nilainya dengan Saldo Awal 2017 ?			Ya
<i>Jika lebih kecil, kemungkinan ada jurnal yang mengurangi akun 218211 (cek apakah jurnal tsb. Benar), jika lebih besar, kemungkinan ada hibah langsung tahun 2017 yang belum disahkan (Segera disahkan)</i>			
3. Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK	Rp.		
2. Jika kolom No.1 bernilai positif, adakah TM dari KL lain senilai tsb.?			Ya
3. Jika kolom No.1 bernilai negatif, adakah TK ke KL lain senilai tsb. ?			Ya
<i>Lakukan telaah menggunakan e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar)</i>			
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?			Ya/Tidak
2. Jika ada, mungkinkah mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya/Tidak
Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	Rp.		
2. Apakah selisih nilai diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?			Tidak

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif?			Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
11. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>			

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo Pos "penyesuaian Nilai Aset" ?			Tidak
2. Adakah saldo akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?			Ada/Tidak
<i>Bila ada "Selisih Revaluasi Aset tetap" apakah benar ada Penilaian Kembali/Revaluasi BMN dari DJKN/KPKNL?</i>			Ada
Pengecekan akun koreksi			
Cetak seluruh akun koreksi per Satker dari e-Rekon&LK (Menu Rincian >> Rincian LK >> Daftar Saldo Akrua), yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?			Ya

NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Ya
2. Adakah pos "Belum Diregister"?			Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahun 2017 dengan 2016, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?			Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2016, Apakah demikian?			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang.	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)			Ada
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)			Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?			Ya
6. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?			Ya

Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
7. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (423141/2/3 atau 42492x) ?			Ada/Tidak
- Ada pendapatan sewa diterima Dimuka (akun 219211) pada Neraca ?			Ada/Tidak
8. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141) ?			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca			Ada/Tidak
9. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca			Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua akun di Neraca LKKL sama dengan di L-BMN?			Ya
<i>Jika telah menggunakan SIMAK e-Rekon (e-Rekon&LK G2) maka lihat pada menu "monitoring >> rekon internal"</i>			
2. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			Tidak
<i>Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? lakukan pengecekan</i>			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")			Tidak
2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?			Tidak
3. Adakah TDK pada Aplikasi e-Rekon&LK ? (Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi") atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif maupun Tidak Aktif ?			Tidak

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?			Ya
2. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan			Tidak
3. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)			Ya
4. Adakah PNBPN digunakan langsung?			Tidak
5. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?			Ya
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?			Ya
7. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?			Ya
3. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?			Ya
4. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?			Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

(
NIP)

.....,

Penelaah,

(
NIP)

P